

ABSTRAK

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah ketimpangan wilayah yang setiap tahunnya selalu meningkat. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu mengatasi masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pola ketimpangan wilayah di Indonesia sebelum dan sesudah implementasi kebijakan desentralisasi fiskal selama periode tahun 1987-2014 dan bagaimana pengaruh dari kebijakan ini terhadap ketimpangan.

Penelitian ini menggunakan teori kuznet dalam melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, hukum wagner dalam melihat pengaruh rasio pajak daerah, teori kutub pertumbuhan dalam melihat pengaruh derajat desentralisasi, dan teori pengeluaran pemerintah. Penelitian ini menggunakan data runtun waktu dengan persamaan model regresi berganda. Untuk mengetahui perbedaan pola ketimpangan wilayah, penelitian ini menggunakan uji Chow.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di Indonesia. Lalu terdapat perbedaan pola ketimpangan wilayah sebelum dan sesudah kebijakan desentralisasi fiskal, dengan melihat pengaruh dari variabel dummy desentralisasi dan dengan melihat nilai F-hitung $2.120394 > F$ tabel 2,069 dari hasil uji Chow. Pada model utama ketimpangan wilayah lebih mempengaruhi ketimpangan dibanding pada model komparatif ketimpangan wilayah. Dalam menurunkan ketimpangan wilayah dibutuhkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berorientasi pada pemerataan.

Kata Kunci: Daerah, Ketimpangan, Fiskal, Desentralisasi, Indonesia.